

MEMBENDUNG ARUS PROGRESIF: DINAMIKA INTELEKTUALISME KOMUNITAS NU

Rumadi

Abstract

In the last decade, intellectualism dynamics among the nahdliyyîn (the followers of NU) has shown an incredible passion in terms of spreading some progressive Islamic ideas that are prominently motored by the youth NU. Such intellectualism passion, unfortunately, is not positively welcome by most nahdliyyîn that are engaging conservative thought of Islam. That is why many negative responds raise against the movement. The responds in turn strengthen some stigmatization from external-NU groups that are very eager to resist any elements of what is called progressive or liberal Islam.

Oppositions against the movement from internal-NU are currently going stronger. The 31st NU Congress in Boyolali has likely become a peak expression and even peak anger of any exponents of conservative NU opposing the progressive exponents. It not only took form into stereotypically rejecting to what called “liberal Islam” ideas but also to anyone engaging liberal-progressive thought. The atmosphere of intellectualism dynamics within NU after its 31st Congress becomes uncomfortable for seedling progressive Islamic ideas. Although it will not exactly put the progressive intellectual movements out but it will simultaneously present harder challenges to them. Above all, the intellectualism dynamics within NU can be considered the struggle between the conservative and progressive groups.

Keywords: NU, Intelektualisme, Dinamika, Anak Muda NU, Pemikiran Progresif, Islam Liberal.

SALAH satu tema penting yang menjadi perbincangan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-31 di Wisma Haji Donohudan Boyolali, 28 Nopember hingga 2 Desember 2004 tempo hari ialah penolakan terhadap berkembangnya pemikiran liberal dalam NU. Bahkan, dalam komisi tausiyah disebutkan agar pengurus NU dari berbagai tingkatan dibersihkan dari orang-orang yang berpaham liberal. Penolakan komisi *bahts al-masâil mandlû'iyah* atas hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran al-Qur'an, dikabarkan juga merupakan bagian dari penolakan atas paham Islam liberal. Inilah puncak kegelisahan beberapa eksponen NU yang tidak nyaman

dengan berkembangnya arus pemikiran baru dalam komunitas NU yang secara *stereotype* disebut sebagai “Islam liberal”. Belakangan, istilah tersebut menjadi “stigma” yang menakutkan di lingkungan NU.

Kenyataan itu menunjukkan, kendati dalam satu dasawarsa terakhir NU—sebagaimana diakui banyak pengamat—menunjukkan gairah intelektual luar biasa yang, antara lain, ditandai dengan semakin banyaknya anak-anak muda NU yang berpikiran progresif, hal itu ternyata dianggap seperti “duri dalam daging”. Mukhtar NU ke-31 beberapa waktu lalu seolah menjadi titik kulminasi dari kegeraman eksponen konservatif NU terhadap arus progresif yang umumnya aktif didesak kaum mudanya. Dalam kerangka itu, tulisan ini ingin melihat dinamika eksternal dan internal perkembangan dinamis intelektualisme NU serta melihat bagaimana masa depan dari gerak arus progresif itu.

Geliat Intelektual Anak Muda NU

Dalam Majalah Panjimas edisi 20 Pebruari 2003, ada komentar menarik dari seorang peneliti Paramadina Jakarta tentang kecenderungan gerakan intelektual anak muda NU. Menurutny, energi intelektual anak-anak muda NU dihabiskan hanya untuk mempertajam dikotomi “tradisionalis-modernis” yang sudah ditinggalkan banyak orang. Penajaman dikotomi itu dilakukan dengan melakukan sejumlah aktivitas ilmiah yang diramu dengan pikiran-pikiran Islam kontemporer dari Nasr Hamid Abû Zayd, Hassan Hanafî, ‘Âbid al-Jabîrî, Moḥammad Arkoun, dan lain-lain, hanya untuk “menghabisi” pemikiran kalangan modernis seperti Nurcholish Madjid dan Dawam Rahardjo.¹ Memang, lanjut kritik itu, di kalangan anak-anak muda NU muncul gairah baru intelektual, menerbitkan jurnal-jurnal, menerbitkan buku-buku dan seterusnya, tetapi jurnal dan buku-buku tersebut selalu diorientasikan untuk membonsai kalangan modernis. Baginya, jurnal-jurnal seperti Taswirul Afkar (Lakpesdam NU), Gerbang (èLSAD Surabaya), dan Postra (ISIS) adalah “jurnal sektarian”, karena sejak awal jurnal-jurnal tersebut dikelola dengan perspektif dan semangat sektarian.

Kritik tersebut, menurut hemat penulis, penting diperhatikan—bukan dengan membantah atau berapologi, tapi sebagai titik tolak untuk terus

¹Lihat Ahmad Gaus AF, “Kritik Nalar Dikhotomi Islam,” *Panjimas*, 20 Pebruari-5 Maret 2003, 99. Namun, dalam tulisan berikutnya, dia memberi apresiasi yang lebih positif terhadap kebangkitan intelektual anak-anak muda NU. Lihat Ahmad Gaus AF, “Kebangkitan Intelektual Kaum Muda NU,” *KOMPAS*, 4 Oktober 2003, 4.

mengkritisi agenda-agenda intelektual yang selama ini dikembangkan. Ada baiknya gerbong gerakan intelektual NU bertanya benarkah apa yang mereka lakukan selama ini sekedar untuk melawan gerakan intelektual dalam komunitas lain? Harus diakui, sebagian anak muda NU memang sangat bersemangat melancarkan kritisisme terhadap pemikiran Cak Nur yang dianggap sebagai gerbong modernisme Islam di Indonesia, seperti Ahmad Baso dan Nur Kholik Ridwan melalui karya-karyanya. Namun, harus segera dicatat bahwa kecenderungan itu bukan satu-satunya arus yang berkembang. Di luar itu, masih terlalu banyak *concern* pemikiran keislaman yang menjadi perhatian mereka. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa energi intelektual anak muda NU dihabiskan untuk mengkritik Cak Nur, menurut hemat penulis tidak seluruhnya benar, meskipun semangat demikian juga tidak bisa dinafikan sama sekali.

Hal demikian juga pernah dikemukakan secara terus terang oleh Ulil Abshar-Abdalla dalam sebuah seminar tentang Post-Tradisionalisme Islam dan Islam Liberal. Sebagai tokoh kunci Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar-Abdalla mengatakan bahwa munculnya komunitas post-tradisionalisme (postra) Islam merupakan kegagalan anak-anak muda NU berdialog dengan realitas di luarnya, kecewa dan cemburu dengan komunitas lain. Postra, dalam pandangan Ulil, merupakan metode “lebih canggih” untuk melestarikan konflik PMII *versus* HMI, NU *versus* Muhammadiyah, modernis *versus* tradisional. Di matanya, postra lebih sebagai upaya untuk mempertegas identitas kelompok daripada untuk mengembangkan wacana pemikiran.² Hal yang sama juga dikemukakan Robin L. Bush dalam disertasinya bahwa postra tak lebih sekedar wujud pelestarian konflik “tradisional-modernis” dengan “baju baru”. Cara pandang demikian memang tidak semuanya keliru, tapi secara tidak disadari pendapat tersebut tetap terjebak pada dikotomi dan senantiasa menempatkan komunitas NU sebagai komunitas “nomor dua”, sehingga ketika muncul geliat baru di antara mereka selalu dipandang sebagai bentuk rivalitas, bukan sebagai gejala alamiah karena mobilitas pendidikan anak-anak muda NU.

Di samping itu, kritik tersebut sebenarnya menyimpan asumsi dan pengandaian bahwa corak intelektual generasi muda NU adalah tunggal dan monolitik. Padahal asumsi sedemikian jauh dari realitas yang sebenarnya,

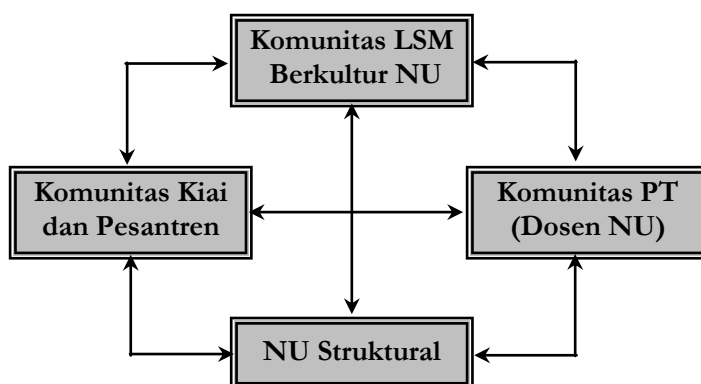
²Catatan pribadi dari seminar “Mendialogkan Post Tradisionalisme Islam dengan Islam Liberal dalam Gairah Baru Pemikiran Islam Indonesia”, yang dilaksanakan BEM IAIN (UIN) Jakarta pada pertengahan November 2001.

karena corak pemikiran generasi muda NU sangat beragam dan jauh dari kesan monolitik. Tidak jarang di antara mereka terjadi perdebatan yang sangat tajam, baik melalui forum-forum resmi, seperti *halaqah*, seminar, diskusi, dan sebagainya maupun dalam forum-forum tidak resmi. Bahkan, di tengah percepatan arus progresif itu anak-anak muda NU terpolarisasi ke dalam “kelompok-kelompok” dengan ikatan sosial tertentu. Tidak jarang di antara kelompok-kelompok tersebut terjadi ketegangan-ketegangan intelektual. Meskipun sulit untuk membuat pemetaan dan pengelompokan di antara mereka, tetapi kenyataan itu dapat dirasakan oleh siapapun yang menyelami dinamika gerakan intelektual dalam komunitas NU. Bukan hanya dalam rivalitas pemikiran ketegangan tersebut terjadi, bahkan hubungan-hubungan pribadi di antara mereka terkadang juga kurang hangat.

Suasana seperti itu tidak banyak ditangkap para pengamat yang tidak secara intens mengikuti dan terlibat dalam pergulatan intelektual kaum muda NU. Ketidakcermatan para pengamat itu tampak, misalnya, ketika mereka menilai forum *bahts al-masâ'il* NU sebagai forum sederhana yang hanya mencari ‘*ibârah-ibârah*’ dalam *al-kutub al-mu’tabarâh*, seolah tidak ada perdebatan intelektual. Penilaian itu semakin menyesatkan ketika para pengamat hanya melihat dokumen-dokumen NU hasil *bahts al- masâ'il* yang hanya berisi pertanyaan dan jawaban atas suatu masalah keagamaan-*fiqhiyah* dengan rujukan ‘*ibârah*’ kitab-kitab fiqh standar sebagai landasan argumentasinya. Dengan pengamatan sekilas, seolah memang tidak ada perdebatan intelektual di dalamnya. Padahal dalam forum *bahts al- masâ'il* sebenarnya selalu terjadi perdebatan-perdebatan yang sangat akademis. Rujukan pada kitab-kitab fiqh adalah salah satu bentuk tradisi intelektual yang secara turun-temurun dipelihara NU dari generasi ke generasi. Namun, sebenarnya kemunculan ‘*ibârah*’ teks kitab kuning dalam setiap *bahts al- masâ'il* tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui diskusi yang dilangsungkan secara intensif. Bahkan, perbedaan pendapat juga sering muncul karena landasan ‘*ibârah*’ yang berbeda. Begitulah. Ringkas kata, keterlibatan secara mendalam pada setiap denyut perubahan yang terjadi dalam komunitas NU sangatlah penting dalam menilai seluruh dinamika intelektual dalam komunitas yang galib disebut tradisional itu.

Sebagaimana disinggung di muka, munculnya generasi baru intelektual NU yang aktif mensosialisasikan gagasan melalui berbagai forum dan program LSM (lembaga swadaya masyarakat) sejauh itu telah mendapat respons yang beragam dari berbagai kalangan. Dalam kaitan itu, penulis

merasa perlu memberi catatan khusus kepada komunitas kiai dan pesantren. Penulis memandang hal itu penting karena implikasi dan masa depan intelektualisme NU sebenarnya juga tergantung pada bagaimana komunitas kiai dan pesantren merespons berbagai dinamika tersebut. Penulis juga tidak bisa begitu saja mengenyampingkan peran dan respons komunitas kampus dalam menyikapi dinamika tersebut. Perbedaan terhadap kedua komunitas tersebut (kiai-pesantren dan komunitas kampus) tentu saja sekedar untuk membuat pengelompokan sederhana, bukan untuk mempertentangkan satu dengan yang lain. Bila dibuat penyederhanaan, berbagai relasi yang menggambarkan dinamika intelektualisme NU dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Keempat pilahan komunitas tersebut senantiasa berinteraksi secara sirkuler dalam proses dinamika pembaruan pemikiran Islam dalam komunitas NU. Pemisahan keempatnya mungkin tidak ada dalam kenyataan, karenanya tidak bisa dipahami secara “hitam-putih”. Komunitas LSM di NU sebagian besar berangkat dari tradisi pesantren dan juga alumni perguruan tinggi. Namun, pembentukan dan pergulatan intelektual mereka justru berlangsung di lingkungan LSM. Oleh karena itu, pesantren dan perguruan tinggi (PT) sebenarnya memberi andil yang cukup besar bagi tumbuhnya intelektualisme NU yang berkembang di lingkungan LSM. Demikian juga beberapa aktivis NU yang menjabat dalam struktur NU maupun badan otonomnya juga menunjukkan adanya tumpang-tindih jika dilihat secara hitam-putih. Terkadang memang sulit untuk membedakan secara tegas (*clear-cut*) antara komunitas LSM dan banom-banom (badan otonom) NU. Oleh karena itu, sekali lagi, perbedaan komunitas tersebut harus dilihat sebagai

alat untuk penyederhanaan realitas belaka, bukan potret dari realitas itu sendiri.

Dalam konteks itu, komunitas LSM berposisi sebagai sentrum liberasi intelektualisme NU. Menempatkan LSM NU sebagai sentrum liberasi agaknya tidak terlalu berlebihan, karena mereka itu menjadi motor penggerak dinamika intelektual melalui program-program yang lebih terstruktur. Hal itu bisa dimengerti, karena dunia LSM memang memberi keleluasaan bagi para aktivisnya untuk mengembangkan aneka gagasan dan pemikiran keagamaan. “Ruang” demikian mungkin agak sulit diperoleh di dunia pesantren yang mempunyai sub-kulturnya sendiri. Demikian pula dengan perguruan tinggi yang begitu *rigid* dengan metodologi. Oleh sebab itu, bisa dipahami jika pemikiran-pemikiran alternatif justru banyak muncul di LSM daripada di pesantren atau perguruan tinggi—apalagi perguruan tinggi NU.

Atas dasar gambaran tersebut, penulis mempunyai asumsi bahwa dalam konteks pengembangan pemikiran, komunitas LSM yang dikelola anak-anak muda NU dapat dikatakan sebagai “subjek” yang menggerakkan dinamika pemikiran NU. Sedangkan komunitas yang lain (pesantren dan PT) justru menjadi “objek” dan menjadi sasaran dari gerakan komunitas LSM. Hal itu dapat dilihat dari hampir semua program pelatihan yang terkait dengan pengembangan pemikiran keislaman selalu menjadikan kiai (terutama kiai muda) dan pesantren serta komunitas kampus (baik dosen maupun mahasiswa) sebagai basis gerakan dan peserta aktif dalam setiap pelatihan yang digelar LSM-LSM yang dikelola anak-anak muda NU. Tak pelak, hampir semua program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pemikiran Islam tidak terlepas dari kata pesantren, kiai, dan mahasiswa sebagai sasaran gerakan. Pada tingkat tertentu, generasi NU yang menempuh karirnya di perguruan tinggi seringkali justru menjadi *counter part*, kalau tidak dikatakan “lawan” dari gerakan intelektual kalangan LSM, terutama dalam isu-isu tertentu.

Aneka Respons

Kenyataan tersebut sebenarnya sudah menjelaskan beberapa bentuk respons berbagai kalangan atas dinamika yang digerakkan (terutama) oleh anak-anak muda NU. Baik secara internal maupun eksternal, respons tersebut selalu tidak tunggal. Secara internal, respons dimaksud umumnya dapat dikategorisasi pada dua. *Pertama*, respons dari kelompok yang *welcomed* dengan gagasan dan aksi yang dilakukan anak-anak muda NU. Walaupun

kelompok ini belum tentu sepenuhnya setuju dengan substansi gagasannya, tapi mereka menunjukkan sikap “bisa menerima”, bahkan pada tingkat tertentu menjadi “pelindung” bagi anak-anak muda NU itu. Figur seperti KH Sahal Mahfudz, KH Muchith Muzadi, dan KH Musthafa Bisri—untuk menyebut beberapa nama—dapat dipandang sebagai kiai-kiai NU yang berada dalam kategori ini. Tentu saja figur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak bisa dilupakan, baik sebagai inspirator maupun “pelindung”.

Kepada para kiai itulah anak-anak muda NU sering mengkomunikasikan gerakan-gerakan mereka, meskipun belum tentu keseluruhan gagasan yang akan dikembangkan sepenuhnya disetujui. Anak-anak muda NU, yang sebagian besar berasal dari pesantren, menyadari betul pentingnya “perlindungan” kiai dalam me-*landing*-kan dan melapangkan program-program mereka. Kegagalan berkomunikasi secara kultural dengan kiai acapkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu anak-anak muda NU biasanya melakukan komunikasi kultural dengan kiai. Bahkan, terkadang para kiai tersebut kerap pula dilibatkan untuk membuka atau turut menjadi penceramah dalam berbagai kegiatan yang mengusung beragam gagasan keislaman progresif sebagaimana telah diuraikan. Strategi kultural itu menjadi sangat penting dalam NU, karena kegagalan melakukan komunikasi kultural dengan seorang kiai yang ditokohkan bisa menjadi ancaman kegagalan bagi bersemainya gagasan-gagasan Islam yang liberal dan progresif.

Kedua, respons dari kalangan yang bersikap keras dan cenderung melawan gagasan keagamaan kritis yang dikembangkan kaum muda NU melalui berbagai LSM tadi. Perlawanan itu antara lain disebabkan karena berbagai pemikiran kritis tersebut dianggap telah keluar dari garis *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* yang dipegangi NU. KH Masduki Mahfudh, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, misalnya, berkali-kali mengemukakan kegundahannya akan gerakan anak-anak muda NU itu. Dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Wilayah NU Jatim, yang diselenggarakan pada 11-13 Oktober 2002 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini Pasuruan, ia mengungkapkan keresahannya melihat perkembangan pemikiran liberalisme generasi muda NU dan menyerukan kepada institusi PWNU Jatim agar segera menginstruksikan kepada warga NU supaya mewaspadaikan dan mencegah pemikiran “Islam liberal”³ dalam masyarakat. “Apabila pemikiran

³Kata “Islam Liberal” di sini dipakai tanpa penjelasan sama sekali. Kata tersebut agaknya sudah menjadi *stereotype* untuk menunjuk jenis pemikiran apapun yang dianggap

Islam liberal tersebut dimunculkan oleh pengurus NU di semua tingkatan agar mendapat teguran keras (*istitâbah*) maupun sanksi organisasi seperti menganulir dari kepengurusan NU”.⁴ Kerisauan tersebut bisa dipastikan tidak hanya dialami oleh KH Masduki Mahfudh, tapi juga menjangkiti benak banyak kiai dan pengurus NU.

Pengurus Cabang NU Lasem, misalnya, juga pernah menunjukkan kegalauan serupa dengan berkirim surat ke PBNU⁵ dalam rangka menyikapi kontroversi tulisan Ulil Abshar-Abdalla berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (*KOMPAS*, 18 Nopember 2002) dan beberapa gagasan Masdar F. Mas’udi yang dianggap tidak lazim. Kendati isinya menanggapi masalah spesifik, yakni kasus kontroversi tulisan Ulil, surat itu sebenarnya merupakan puncak dari “gunung es” kegundahan beberapa tokoh NU. Beberapa poin isi surat tersebut yang relevan dikemukakan di sini, antara lain:

“membahayakan” Islam karena mempertanyakan atas apa yang selama ini dianggap sudah mapan. Hanya saja, satu hal yang perlu dicatat bahwa sebagian besar aktor intelektual di kalangan anak muda NU enggan disebut sebagai “Islam Liberal”. KH Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah PB NU, ketika memberi sambutan dalam acara “Muktamar Pemikiran Islam di NU” pada 3-5 Oktober 2003 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo juga menyinggung masalah Islam liberal. Secara khusus Hasyim Muzadi minta kepada Ulil Abshar-Abdalla agar NU tidak dikait-kaitkan dengan Islam Liberal serta tidak membawa-bawa nama NU dalam gerakan pemikirannya karena hal tersebut bisa berakibat buruk bagi jam’iyah NU yang komunitasnya sangat beragam, dari yang sangat konservatif sampai yang sangat liberal.

⁴*Panjimas*, No. 17/Tahun I/Oktobre 2003, 29; Lihat juga, *Tempo Interaktif*, 12 Oktober 2002; dan *Aula*, Januari 2003, 41. Penulis juga memperoleh informasi yang sama dari Masdar F. Mas’udi, karena ketika kalimat tersebut diucapkan KH Masduki Mahfudh, Masdar hadir di tempat tersebut untuk menjadi pembicara seminar yang masih menjadi rangkaian acara Konferwil. Bahkan, cerita Masdar, Kiai Masduki mengemukakan bahwa pemikiran orang seperti Masdar F. Mas’udi, Ulil Abshar-Abdalla, dan Husein Muhammad boleh didengarkan, tapi jangan diikuti.

⁵Surat tertanggal 4 Pebruari 2003 itu dilayangkan ke PBNU setelah NU Cabang Lasem mengadakan *halaqah* pada 27 Januari 2003 yang membahas tentang gagasan kontroversial Ulil Abshar dan Masdar F. Mas’udi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pleno pada 31 Januari 2003. Surat tersebut juga dilampiri risalah setebal 38 halaman berjudul *Bayân ‘Aqâid al-Mu’minîn al-Akhyâr Dhidd Abâthîl al-Mâriq Ulîl Abshar* (Penjelasan Akidah Kaum Mukminin Terpilih untuk Melawan Orang yang Telah Keluar dari Agamanya, Ulil Abshar) yang ditulis Muhammad Najih bin Maimun Zuber, seorang kiai dari Pesantren Sarang, Rembang yang juga putra Kiai Maimun Zuber. Risalah tersebut berisi kupasan kata per kata dari tulisan Ulil Abshar untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut mengandung banyak unsur yang dianggap sesat.

1. Menyesalkan sikap PBNU yang terkesan diam atas kontroversi tulisan Ulil Abshar, padahal Forum Umat Islam Indonesia (FUII) telah memberi reaksi keras dengan ‘fatwa mati’. NU Cabang Lasem minta PBNU agar mengeluarkan pernyataan resmi bahwa gagasan JIL (Masdar dalam surat tersebut dimasukkan sebagai bagian dari JIL) adalah *bid’ah dhalalah* dan menyimpang dari paham *aswaja* (*ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah*).
2. Minta kepada PBNU, jika Ulil Abshar dan Masdar F. Mas’udi tidak bersedia *rujû’ ilâ al-haqq* diberi sanksi organisasi (dipecat dari keanggotaan/kepengurusan NU) karena keduanya dianggap tokoh JIL yang sesat dan menyesatkan (ART NU Bab II pasal 4 ayat 3). Pada saat yang sama PBNU diminta untuk selalu mewaspadai segala paham sesat baik dari dalam maupun luar NU.
3. Tidak setuju dengan kegiatan Masdar F. Mas’udi yang mengatasnamakan kekatiban dan menggunakan stempel PBNU untuk kepentingannya sendiri.⁶

Dalam pada itu, keresahan juga muncul di kalangan ulama senior NU yang lazim disebut “kiai khos”. Dalam pertemuan “kiai khos” di Buntet Cirebon pada 10 Maret 2004 lampau, yang dihadiri beberapa kiai senior seperti KH Abdullah Faqih (Tuban, Jatim), KH Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon), KH Fachruddin Masturo (Sukabumi), KH Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung), dan sebagainya, itu sebenarnya digelar untuk menyikapi perkembangan politik nasional menyangkut pencalonan KH Abdurrahman Wahid sebagai kandidat presiden dalam pemilu 2004—yang akhirnya memang harus gagal karena dianggap KPU tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Salah satu keputusan pertemuan itu menyebutkan bahwa menyikapi kerisauan dan keprihatinan warga NU terkait munculnya pemikiran keagamaan yang dilontarkan kalangan intelektual muda NU yang dianggap bertentangan dengan doktrin *ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah*, maka

⁶Hal itu terkait dengan kegiatan Masdar F. Mas’udi sebagai Direktur P3M Jakarta melalui program Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) yang menggelar *halaqah* di berbagai wilayah yang selalu dikaitkan dengan kekatiban Syuriah PBNU. Penulis yang juga terlibat dalam program itu menyadari bahwa kekatiban dalam Syuriah PBNU memang tidak bisa menjadi “institusi” tersendiri dalam Syuriah. Menggandeng lembaga Syuriah semata-mata dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan program di kantong-kantong NU. Masdar F. Mas’udi dalam sebuah rapat tim program JIE pernah mengatakan bahwa hal itu ia lakukan dengan sepengetahuan Rais ‘Am Syuriah PBNU, KH Sahal Mahfudh.

warga NU disarankan agar tidak mengadopsi pemikiran tersebut dan menganggap pemikiran itu tidak sebagai bagian dari NU.⁷

Pernyataan tersebut jelas menggambarkan adanya kerisauan yang sangat mendalam di antara banyak kiai senior NU melihat perkembangan pemikiran dan gerakan yang dilakukan anak-anak mudanya yang berpikiran liberal-progresif. Bahkan, dalam situasi di mana mereka tengah membincang masalah politik yang sangat aktual pada masanya, mereka masih juga sempat “teringat” dengan problem itu. Hal itu jelas menunjukkan adanya keresahan luar biasa yang selalu mengganggu pikiran mereka. Namun, sayangnya, para kiai senior tersebut tidak memberi tanggapan yang lebih substansial menyangkut beberapa hal yang terkait langsung dengan pemikiran dan gagasan yang dianggap “menyimpang” tersebut, sehingga publik bisa menguji.

Kerisauan senada juga tampak dari pernyataan KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, ketika memberi sambutan pembukaan “Muktamar Pemikiran Islam NU” di PP Salafiyah Syafi’iyah Asembagus Situbondo, Jawa Timur.⁸ Hasyim Muzadi yang dikenal cukup moderat *performance* pemikiran ke-Islaman-nya, ternyata tidak sepenuhnya *happy* dengan gejala liberalisasi yang terjadi di kalangan generasi muda NU. Dalam sambutannya, Hasyim secara khusus minta kepada Ulil Abshar-Abdalla agar tidak mengatasnamakan NU. Sebab, jika pemikiran tersebut tanpa kontrol, keadaan ini bisa berakibat buruk bagi jam’iyyah NU yang komunitasnya sangat beragam dari yang sangat konservatif hingga yang sangat liberal. Namun, lanjut Hasyim, bukan berarti pemikiran liberal akan dipasung. Mereka akan diberi forum agar dapat berdebat dan beradu argumentasi atas

⁷Data ini penulis peroleh dari milis KMNU, sebuah milis yang dikelola anak-anak muda NU, terutama yang sedang studi di al-Azhar, Kairo, pada 10 Maret 2004. Media massa memang kebanyakan tidak mengangkat poin ini, karena mereka lebih fokus pada pemberitaan politik, yakni soal pencalonan Gus Dur menjadi presiden.

⁸Acara tersebut berlangsung pada 3-5 Oktober 2005. Diadakan sebenarnya dengan maksud untuk mendialogkan pemikiran-pemikiran progresif yang berkembang di lingkungan anak-anak muda NU dengan seluruh eksponen NU, baik pengurus NU maupun kiai-kiai yang tersebar di berbagai wilayah. Sayangnya, acara ini tidak berjalan maksimal bukan saja karena sedikitnya kiai-kiai yang datang, tapi juga terjadinya friksi internal di kalangan anak-anak muda NU sebagai inisiator. Bahkan, aktivis *LKIS* yang dikenal sebagai salah satu motor penting gerakan liberasi pemikiran keislaman tidak berpartisipasi dalam kegiatan itu. Walau demikian, gagasan untuk mendialogkan berbagai gagasan dan perkembangan pemikiran Islam di lingkungan NU tetap patut dihargai.

pemikiran-pemikiran yang kontroversial dalam masyarakat. Kalau dilepas begitu saja, akan berdampak kurang baik pada warga NU, katanya. Meski demikian, Hasyim menyadari bahwa PBNU tidak mungkin melarang pemikiran seaneh apapun dalam NU, karena hal itu merupakan hak setiap manusia. Tidak diizinkan menggunakan label NU, kata Hasyim, semata-mata untuk mencegah efek yang tidak diinginkan.⁹

Dalam pada itu, Hasyim Muzadi sendiri tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan “akan berdampak kurang baik” bagi warga NU dan “efek yang tidak diinginkan” itu. Pernyataan itu, hemat penulis, agaknya dimaksudkan untuk memberi “penyeimbang” dan “pengontrol” agar keliruan pemikiran tidak mengaduk-aduk berbagai dimensi keagamaan yang dipandang “sakral”. Pernyataan Hasyim itu juga bisa dinilai untuk “meredam” amarah beberapa kiai yang benar-benar risau dengan “kenakalan” pemikiran generasi mudanya. Namun, di sisi lain, pernyataan tersebut dapat juga dimaknai bahwa institusi NU seolah ingin “cuci tangan” dan merasa tidak ikut bertanggung jawab dengan agenda-agenda pemikiran yang dikembangkan generasi muda NU. Jika hal yang terakhir ini benar, maka berarti NU telah mengalami apa yang disebut “ketertinggalan institusional” (*institutional lack*), di mana institusi NU tertinggal dari perkembangan warganya sendiri.

Secara keseluruhan, fenomena itu sebenarnya dapat dibaca sebagai bentuk kesenjangan antara NU sebagai institusi formal yang harus taat dengan segala aturan organisasi berikut kaidah-kaidahnya dan NU yang dipahami dan dihayati oleh para aktivis di luar struktur. Kesenjangan itu sebenarnya bukan fenomena baru, tapi gejala lama yang hingga kini belum bisa dicarikan jalan keluarnya. Sebagaimana terjadi dalam bidang-bidang yang lain, seperti bidang pendidikan, perubahan melalui struktur formal NU senantiasa mengalami hambatan karena kompleksnya kepentingan di dalamnya. Demikian juga, pengembangan pemikiran kerap kali macet bila dilakukan melalui struktur resmi NU.

Kesenjangan antara institusi NU dan perkembangan di luar struktur NU menyangkut pemikiran Islam tersebut mencapai puncaknya dalam Mukhtamar

⁹Pernyataan itu memang secara khusus ditujukan kepada Ulil Abshar-Abdalla karena dia menjadi Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) yang lontaran-lontaran pemikirannya dinilai meresahkan banyak orang. Menurut penulis, peringatan itu sebenarnya ditujukan bukan kepada Ulil semata, tapi juga untuk kalangan lain di lingkungan NU yang melakukan gerakan serupa meski dengan tema dan perspektif yang berbeda.

NU ke-31 yang berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng 28 November sampai 2 Desember 2004 lalu. Salah satu tema penting yang menjadi perbincangan dalam Mukhtar NU ke-31 adalah mengenai penolakan terhadap berkembangnya pemikiran liberal yang dikembangkan anak-anak muda NU melalui berbagai jalur. Menyentuhnya isu Islam liberal menjelang mukhtar itu diawali oleh KH Mas Subadar, seorang ulama asal Pasuruan, yang mengeluarkan pernyataan keras: “Pada mukhtar sekarang ini, yang paling mendesak untuk segera diputuskan adalah membersihkan orang-orang JIL dari NU. Jangan ada orang JIL di NU!”¹⁰ Pernyataan keras seorang tokoh yang cukup berpengaruh itu terutama ditujukan kepada Ulil Abshar-Abdallah yang menjadi koordinator JIL dan KH Masdar F. Mas’udi yang secara serampangan dianggap sebagai bagian dari JIL. Penyebutan KH Masdar sendiri sebagai bagian JIL menjadi menarik, terlebih saat itu ia turut diperbincangkan sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU meskipun akhirnya gagal.

Pernyataan KH Mas Subadar itu seolah diulang oleh Hasyim Muzadi ketika memberi pidato pengantar laporan pertanggungjawaban dalam mukhtar yang sama. Dalam kesempatan itu, Hasyim Muzadi mengemukakan kembali definisi NU sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam yang beraliran moderat. Kata “moderat”, oleh Hasyim Muzadi dimaknai sebagai “tidak radikal, tidak liberal”. Bahkan, Hasyim menegaskan bahwa Islam liberal tidak cocok dengan NU karena kata “liberal”—dalam pemaknaan dia—berarti “kecenderungan untuk menghalalkan semua hal”. Pernyataan itu memang bukan hal baru bagi Hasyim Muzadi, karena hal yang kurang lebih sama pernah dia kemukakan ketika membuka Mukhtar Pemikiran Islam di NU pada Oktober 2003 di Situbondo.

Di samping itu, dalam arena Mukhtar ke-31 itu, penulis juga menemukan sejumlah selebaran yang berisi penolakan terhadap kelompok JIL. Isinya sekitar penolakan kemungkinan masuknya beberapa orang yang distigma sebagai agen Islam liberal masuk dalam jajaran kepengurusan NU. Hal itu jelas menunjukkan bahwa arus perlawanan terhadap Islam liberal cukup serius dilakukan dalam tubuh NU. Sembilan belas kiai sepuh, seperti KH Sahal Mahfudh, KH Mas Subadar, KH Muhaimin Gunardo, KH Masruri Mughni, dan sebagainya, menandatangani ikrar penolakan terhadap

¹⁰*Tempo Interaktif*, 23 Oktober 2004.

apa yang disebut Islam liberal. “NU harus menolak cara berpikir liberal yang menyimpang dari *ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah*”, demikian bunyi ikrar tersebut.¹¹

Dalam forum resmi muktamar, hal yang sama juga muncul dalam berbagai sidang komisi, seperti komisi *Bahṭs al-Masâ’il Mawdlû’iyyah* dan komisi Tausiyah. Dalam komisi *Bahṭs al-Masâ’il Mawdlû’iyyah* yang salah satunya membahas tema hermeneutika justru menjadi ajang penolakan terhadap apa yang didefinisikan sebagai proyek pemikiran Islam liberal. Hal itu antara lain tercermin dalam penolakan *muktamirin* terhadap hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran al-Qur’an, karena metode ini dikhawatirkan akan membangkitkan kelompok Islam liberal dalam NU yang akhirnya akan melahirkan kegoncangan pikiran warga NU. Kegelisahan beberapa eksponen NU yang tidak nyaman dengan berkembangnya arus pemikiran baru dalam komunitas NU yang secara *stereotype* disebut sebagai “Islam liberal” itu akhirnya diserahkan kepada komisi Tausiyah. Komisi ini kemudian merekomendasikan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip *ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah*, NU menolak segala bentuk fundamentalisme, ekstrimisme, liberalisme, dan aliran-aliran menyimpang lainnya. Konsekuensinya, pengurus NU dari berbagai tingkatan, termasuk banom-banom-nya, harus dibersihkan dari orang-orang yang berpaham liberal. Dari sini jelas, secara langsung maupun tidak, pikiran-pikiran liberal dianggap sebagai bentuk kesesatan yang bukan saja harus diwaspadai, tapi juga harus ditolak.¹²

Sementara itu, kelompok-kelompok anak muda NU progresif dalam Muktamar ke-31 itu lebih banyak berada di luar arena dengan mengusung isu tentang politisasi NU oleh Hasyim Muzadi daripada mengusung arus pemikiran baru. Barangkali mereka menyadari bahwa muktamar NU bukanlah arena mereka, tapi arena “kubu konservatif” NU sehingga tidak ada gunanya untuk melakukan kontestasi dalam forum tersebut. Memberi perlawanan pemikiran dalam arena muktamar justru akan kontraproduktif dan semakin menambah kebencian kubu konservatif. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau arena muktamar berubah menjadi arena pengadilan *in absentia* terhadap arus pemikiran progresif-liberal.

Di luar arena resmi muktamar, perdebatan tentang pemikiran Islam liberal juga terjadi dalam berbagai diskusi informal. Suasana hujatan dan

¹¹*Majalah Berita Mingguan Tempo*, Edisi 6-12 Desember 2004.

¹²Bandingkan dengan Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2003).

cemoohan terhadap arus ini senantiasa muncul. Dalam dua diskusi yang penulis ikuti, masing-masing adalah bedah buku yang ditulis KH Sahal Mahfudh dengan nara sumber KH Husein Muhammad dan Syafiq Hasyim; serta bedah buku yang ditulis Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fathoni¹³ dengan nara sumber Hilmy Muhammadiyah dan Ahmad Baso, benar-benar menjadi arena “pengadilan” terhadap apa yang disebut Islam liberal oleh peserta diskusi. Penulis sendiri tidak terlalu terkejut dengan cercaan-cercaan dari peserta diskusi yang memang sudah bisa diduga sebelumnya, termasuk kepada KH Husein Muhammad yang sering dikelompokkan sebagai “kiai marjinal” karena berpikir liberal.¹⁴ Pernyataan yang agak mengejutkan justru dari Ahmad Baso yang selama ini diidentifikasi sebagai eksponen pemikir muda NU yang progresif. Sambil mencela Islam liberal yang dikatakan anti tradisi dan anti kebudayaan lokal, Ahmad Baso mengatakan bahwa “*tugas kita adalah meng-aswaja-kan JIL, bukan men-JIL-kan Aswaja*”.

Penulis tidak tahu apa motif di balik pernyataan tersebut, tetapi secara sederhana hal itu bisa ditafsirkan dari dua sisi. Di satu sisi, Ahmad Baso ingin berada dalam “posisi aman” karena menyadari bahwa audien yang ia hadapi adalah orang-orang yang tidak senang dengan Islam liberal, di lain sisi ia ingin menegaskan ulang bahwa “post-tradisionalisme Islam” yang diusung (sebagian) anak muda NU tidak sama dengan “Islam liberal”. Titik pembeda antara keduanya, bagi Ahmad Baso, adalah penghargaan terhadap *turâst* dan tradisi lokal. Tentu saja ini penilaian sepihak yang belum tentu diamini oleh mereka yang mengusung tema Islam liberal.¹⁵

Setelah arena Muktamar ke-31 selesai, serangan Ahmad Baso terhadap kelompok Islam liberal semakin kencang. Dalam sebuah diskusi kebudayaan yang digelar *website* resmi PBNU, *NU online*, Ahmad Baso mengkaitkan kritiknya terhadap Islam liberal dengan kuatnya kaum orientalis mendominasi secara kultural dengan memelihara dan merawat dirinya

¹³Kedua buku tersebut adalah KH Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004); Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fathoni, *NU: Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: elsas, 2004).

¹⁴KH Husein Muhammad dikenal sebagai “kiai gender” karena perhatiannya yang begitu kuat pada isu-isu perempuan. Belakangan dia berani melakukan sesuatu yang kurang lazim dilakukan seorang kiai, yaitu menikahkan pasangan beda agama, laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim. Lihat refleksinya berjudul “Wali Dua Imam,” *Majalah Syir'ah*, Edisi Pebruari 2005.

¹⁵Tanggapan mengenai hal tersebut lihat Novriantoni, “Mempersempit Ruang Tabu Pemikiran”, *Indopos*, 12 Desember 2004.

sebagai yang modern dan NU sebagai yang tradisional. Sampai di sini Baso mulai “menyerang” Islam liberal dengan mengatakan:

“Jaringan Islam Liberal (JIL) selalu menganggap tradisi sebagai bermasalah, seperti pernah ditulis Ulil Abshar-Abdalla pasca Muktamar NU ke-31, bahwa penolakan peserta muktamar terhadap hermeneutika dianggap sebagai pergeseran NU dari kritis menjadi “kanan”. Penolakan itu, oleh JIL tidak pernah dibaca sebagai wacana tandingan, bagaimana NU mencitrakan dirinya, bukan untuk menerima apa saja yang ditawarkan orientalisme hanya untuk bisa disebut modern atau kritis sebagai obyek konstruksi historis. Justru dalam muktamar baru-baru ini sebenarnya NU menawarkan pendekatan dalam pengambilan keputusan hukum yang diyakini lebih baik”.¹⁶

Terkait dengan itu, Ahmad Baso mempunyai cara pandang berbeda atas apa yang terjadi dalam Muktamar NU ke-31, terutama yang terkait dengan penolakan atas hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an. Baso menguraikan bahwa hermeneutika merupakan produk ilmu-ilmu sosial Barat yang diracik dalam konteks pergumulan dengan ilmu-ilmu alam dalam menafsirkan “kebenaran” dunia. Namun, pergumulan internal dalam lingkungan kosmologi Barat ini kemudian bermasalah ketika Eropa mulai melancarkan ekspansi ekonomi dan tanah ke wilayah dunia Timur. Ilmu-ilmu alam, yang dikenal dengan tradisi positivismenya, bukan hanya menjarah kekayaan dunia Timur, melainkan juga segenap alam pikiran dan kebudayaan Timur. Hermeneutika kemudian menyusul. Awalnya, menumpang dalam “kereta” filologi yang membuka kedok rahasia teks-teks Timur, hermeneutika kemudian menumpang dalam segenap proyek dan kerja-kerja pengungkapan makna teks, apakah teks itu teks “biasa”, teks “suci” atau teks “dunia” ini. Hermeneutika pun masuk ke dalam kerja-kerja pembaruan penafsiran atas teks-teks keislaman.

Ketika dalam arena Muktamar NU ke-31 dibahas kemungkinan menggunakan hermeneutika untuk teks-teks keagamaan, maka muncullah kecurigaan. Soalnya, peserta Muktamar melihat hermeneutika menumpang kendaraan “Islam liberal” yang sudah sejak awal dipersoalkan. Penolakan atas hermeneutika oleh sebagian besar peserta muktamar karena tradisi ditempatkan sebagai objek yang dibedah, sementara hermeneutika sebagai

¹⁶Ahmad Baso, “Biarkan NU Membangun Citra atas Dirinya Sendiri”, dalam www.nu.or.id, tanggal 12 Januari 2005. Kritik Ahmad Baso tersebut dialamatkan sehubungan dengan tulisan Ulil Abshar-Abdalla yang memberi beberapa komentar atas apa yang terjadi dalam Muktamar NU ke-31, “Angin itu Berhembus ke Kanan,” *Majalah Tempo*, Edisi 8-14 November 2004.

subjek yang membedah. Namun, papar Baso, ketika hermeneutika disepakati dalam arena muktamar untuk ditolak, maka kenyataan pun lalu menjadi terbalik: hermeneutika justru yang menjadi objek yang dipandang, dan peserta Muktamar NU 2004 menjadi subjek yang memandang. Padahal, ketika hermeneutika diperkenalkan, asumsinya adalah bahwa NU perlu diceraikan dalam menilai tradisinya, perlu dibebaskan dari segenap penafsiran yang konservatif, untuk membuat NU jadi moderat dan liberal.¹⁷

Masa Depan Intelektualisme NU

Pergumulan yang terjadi dalam arena Muktamar ke-31 tersebut sebenarnya cukup merefleksikan berbagai varian dan tarik-menarik arus pemikiran keagamaan yang berkembang di NU. Kenyataan itu dapat diberi beberapa makna. *Pertama*, menyemai pemikiran progresif-liberal dalam lingkungan NU formal bukanlah hal yang mudah. Bahkan, dalam Muktamar ke-31 tempo hari resistensi NU formal tampak luar biasa, sehingga mereka menjadi sangat sensitif terhadap segala bentuk pembaruan pemikiran. Mereka dengan mudah memvonis “Islam liberal” atas siapa saja yang dianggap sebagai “lawan” dalam pemikiran Islam. Kondisi demikian sebenarnya kurang sehat dalam konteks pengembangan intelektualisme NU, karena sikap “*over sensitive*” akan menjerembabkan kaum nahdliyin pada sikap kekanak-kanakan dalam berpikir.

Selanjutnya, *kedua*, hal itu, sekali lagi, menunjukkan bahwa dalam lingkup eksponen anak-anak muda NU sendiri terjadi saling silang pendapat dan kritik atas berbagai arus kecenderungan pemikiran. Apa yang dikemukakan Ahmad Baso atas proyek pemikiran “Islam liberal” yang dimotori Ulil Abshar-Abdalla—meski “Islam liberal” tidak bisa diklaim sepenuhnya sebagai arus pemikiran NU karena aktivisnya sangatlah beragam *social origin*-nya— secara jelas menunjukkan hal itu. Dengan demikian, arus pemikiran

¹⁷Lihat www.nu.or.id, tanggal 12 Januari 2005. Ahmad Baso bukan satu-satunya orang yang melakukan kritik dengan perspektif yang kurang lebih sama. Lihat, misalnya, Umaruddin Masdar, *Agama Kolonial: Colonial Mindset dalam Pemikiran Islam Liberal*, (Yogyakarta: Klik.r, 2003). Lihat pula, M. Arief Hakim, “Watak Kolonial ‘Islam Liberal’ dan ‘Kelas Terdidik’,” *Istiqra*, Volume 2 Nomor 1 (2003): 279-87. Tulisan Arief sendiri merupakan resensi atas buku Umaruddin Masdar yang disandingkan dengan buku yang boleh dikatakan sebagai manifesto Islam liberal, Ulil Abshar Abdalla dkk, *Wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: JIL, 2002).

Islam progresif yang menandai post-tradisionalisme Islam di lingkungan NU menunjukkan kecenderungan yang beragam.

Ketiga, kenyataan itu juga menunjukkan, meskipun dalam dua dasawarsa terakhir NU menunjukkan gairah intelektual luar biasa yang, antara lain, ditandai dengan semakin banyaknya anak-anak muda NU berpikiran progresif dan menempuh pendidikan tinggi, hal itu ternyata masih menjadi lapisan yang sangat tipis sehingga mudah dieksklusi. Alih-alih menduduki struktur dalam NU, mereka bahkan sering dianggap bukan bagian dari NU. Kelompok progresif ini sering dianggap seperti “duri dalam daging” yang justru menjadi penyakit, bukan sebagai kebanggaan. Kemudian, *keempat*, dari segi substansi pemikiran keagamaan yang dikembangkan harus diakui bahwa mereka masih menjadi konsumen dari arus pemikiran yang berkembang di luar, baik Timur Tengah maupun Barat. Sejauh itu belum ada pemikiran yang benar-benar orisinal. Mereka juga masih butuh pusat orientasi pemikiran, kendati pusat orientasinya tidak lagi tunggal sebagaimana terjadi pada abad sebelumnya yang menjadikan Haramain (Mekah dan Madinah) sebagai pusat orientasi intelektual.¹⁸

Melihat seluruh kenyataan tersebut, masa depan intelektualisme NU agaknya selain akan menampilkan wajah yang kian dinamis, juga akan diwarnai dengan desakan yang semakin kuat dari pemegang struktur NU. Meskipun pemegang struktur NU tidak akan secara langsung melakukan kontrol atas pemikiran yang berkembang, tetapi para kiai yang selama ini dikenal berada dalam kubu konservatif tampaknya bakal selalu “mengawasi” orang-orang yang dianggap “membahayakan”. Bila hal itu terjadi, maka para aktivis LSM dalam komunitas NU yang mengembangkan pikiran-pikiran keislaman progresif praktis akan semakin banyak menghadapi kendala terutama yang terkait dengan patronase kiai. Namun, bagaimanapun, dapat dipastikan hal itu tidak akan sepenuhnya mampu mematikan gerakan progresif anak-anak muda NU. Sebab, selain persebaran *discourse* Islam progresif yang sudah semakin merata di banyak kantong (*enclaves*) NU, anak-anak muda nahdliyyin yang menempuh jenjang pendidikan tinggi juga semakin banyak. ●

¹⁸Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995).